

## Fasilitas Umum I Pengembang Tunggak Fasos dan Fasum 3.000 Hektare Pemprov Tidak Miliki Inovasi RTH



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PRD) DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki inovasi dalam mengejar target penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 13,94 persen sampai masa baktinya selesai pada 2012. Padahal jika Gubernur serius, dia bisa memaksa sejumlah pengembang yang menunggak fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum).

"Gubernur seharusnya memaksimalkan RTH dengan menagih sejumlah pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos dan fasumnya. Sayangnya, penegakan hukum sangat lemah sehingga aset yang seharusnya menjadi milik pemprov masuk dalam kategori RTH ini hilang dan sulit untuk diambil kembali," Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, Selasa (27/9).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saat ini terdapat sejumlah pengembang yang menunggak atau belum menyerahkan kewajiban fasos dan fasumnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai sekitar 3.000 hektare. Jika dinilai dengan rupiah, mencapai sekitar 30 triliun hingga 40 triliun rupiah.

Menurut dia, jika Fauzi Bowo berani tegas dan berhasil menarik tunggakan fasos dan fasum itu dari pengembang, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta mengenai pengadaan RTH 13,94 persen hingga 2012 dapat terpenuhi.

Ia menambahkan target penambahan RTH tersebut juga tertuang dalam visi dan misi Fauzi Bowo saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juli 2007. Target penambahan RTH selanjutnya akan dituangkan dalam visi dan misi Gubernur yang akan terpilih pada pemilihan kepala daerah pada 2012.

Selain itu, lanjutnya, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2011 - 2030 yang baru telah memasukan sejumlah kebijakan penyediaan RTH, yakni 20 persen RTH publik dan 10 persen merupakan RTH privat.